



**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**  
**PEMERINTAH KOTA BATAM**

**6.1. Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan**

Tidak terdapat penggantian manajemen pada Pemerintah Kota Batam selama Tahun 2024.

**6.2. Kesalahan Manajemen Terdahulu Yang Telah Dikoreksi Manajemen Baru**

Tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang prinsipil dari manajemen terdahulu yang dikoreksi oleh manajemen baru.

**6.3. Komitmen dan Kontinjensi**

Neraca Pemerintah Kota Batam per 31 Desember 2024 menyajikan:

- Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp4.994.999.991,39. Aset Lainnya ini merupakan realisasi biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam atas Pembangunan Gedung Pusat Promosi Se-Sumatera (SPC) di Batam. Pembangunan fisik Gedung SPC hanya berasal dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Batam, dan Otorita Batam yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Gedung Pusat Promosi Se – Sumatera di Batam Nomor 02a/SKB/X/200X/2002, Nomor 04/HK/MoU/X/2002, Nomor 09/PERJ – KA/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002. Sesuai dengan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Penetapan Komposisi Pembiayaan dan Bagi Hasil Pengelolaan Gedung SPC (*Sumatera Promotion Centre*) di Batam Nomor LAP-372/D1.05/2/2007 yang dilaksanakan oleh BPKP, realisasi biaya Pembangunan Gedung Pusat Promosi Se-Sumatera (SPC) Batam sebesar Rp79.070.479.861,39 dengan komposisi pembiayaan (sharing) masing-masing pihak yaitu:
  - Pemerintah Provinsi Riau Rp41.759.000.003,00 atau 52,81%
  - Pemerintah Kota Batam Rp4.994.999.991,39 atau 6,32%
  - Badan Otorita Batam Rp31.315.979.867,00 atau 40,87%.
- Piutang Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp376.262.213,38 yang merupakan piutang royalti atas Kemitraan Gedung SPC yang dikelola oleh Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) sesuai Kesepakatan Bersama Nomor 18/SKB/VI/2005, Nomor 10/PERJ/KA/VI/2005, Nomor 13/MoU/HK/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Pengaturan Pengelolaan Gedung SPC. Sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung SPC antara BPP dengan Direksi PT Sembilan Satu-Satu, maka tugas dan wewenang pengelolaan Gedung SPC dilaksanakan oleh PT Sembilan Satu-Satu. Pendapatan atas pengelolaan Gedung SPC yang merupakan hak ketiga pihak pemilik Gedung SPC akan didistribusikan kepada masing-masing pihak berdasarkan sharing yang telah disepakati bersama.



Belanja pada SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) atas Sewa Gedung SPC / Mall Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2020 dan 2021 belum dapat terealisasi karena dokumen pendukung untuk pengajuan pembayaran atas belanja tersebut belum lengkap walaupun sudah dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp5.170.840.000,- dan tahun 2021 sebesar Rp4.252.700.000,00.

Atas belanja sewa yang belum terealisasi tersebut juga tidak disajikan sebagai Kewajiban dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 dikarenakan tidak ada perikatan sewa menyewa dalam surat perjanjian.

#### **6.4. Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi Pada Tahun Berjalan**

Tidak terdapat penggabungan atau pemekaran pada Pemerintah Kota Batam pada Tahun 2024.

#### **6.5. Kejadian yang berdampak sosial**

Selama Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat kejadian-kejadian yang mempunyai dampak sosial yang cukup materil untuk mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Kota Batam yang disajikan.

#### **6.6. Pengungkapan Lainnya**

##### **6.6.1. Domisili**

Pemerintah Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), berdomisili di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau.

##### **6.6.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Mendasari Kegiatan Operasional Entitas**

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



- 2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas



- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);



- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- 24) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 34) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1092);
- 35) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1093);
- 36) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4);
- 37) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7);
- 39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024, Nomor 4);
- 40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);



- 41) Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalihan Hak, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan/Pengendalian Rumah Negara Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 666);
- 42) Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 771);
- 43) Peraturan Walikota Batam Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 785);
- 44) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 868);
- 45) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 248 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1116);
- 46) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 208 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1335);
- 47) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 208 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1404);
- 48) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 208 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1413);
- 49) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 208 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1419);
- 50) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1422);
- 51) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1544);
- 52) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 207 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1547);
- 53) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 215 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1555);

- 54) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 218 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1558).

### **6.6.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai unsur pendukung tugas Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Rumah Sakit Embung Fatimah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, terdiri dari :

- 1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
- 2) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 863) diubah sebagian dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 935);
- 3) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864) diubah sebagian dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 936).
- 4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1330);



- 5) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1331);
- 6) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1352);
- 7) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1353);
- 8) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1354);
- 9) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 15 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1355);
- 10) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1356);
- 11) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1357);
- 12) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1359);
- 13) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1360);
- 14) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1362);
- 15) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1365);
- 16) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1366);



- 17) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1367);
- 18) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1368);
- 19) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1369);
- 20) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1370);
- 21) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1371);
- 22) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1372);
- 23) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1373);
- 24) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 34 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Perikanan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1374);
- 25) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1375);
- 26) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 36 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1376);
- 27) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1377);
- 28) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 38 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1378);



- 29) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1379);
- 30) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1380);
- 31) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1381);
- 32) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Kecamatan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1382);
- 33) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1383);
- 34) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1384).